

Pemkot Bogor Berencana Lanjutkan Bansos Terdampak Covid di Tahun 2021

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang berakhir Desember 2020 untuk diperpanjang 2021.

Total kuota penerima bansos Kota Bogor berjumlah 23.000 dan setiap bulannya menerima uang tunai Rp 500.000.

Meskipun secara teknis belum ada pembahasan lebih lanjut, namun persiapannya sudah dilakukan. Ditambah belum lama ini, Pemkot selesai melakukan rapat anggaran.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menegaskan bansos itu harus masih tetap ada di tahun depan. Paling tidak, kata Dedie, dalam satu semester kedepan masyarakat masih perlu untuk dibantu.

"Terutama mereka yang terdampak langsung pandemi covid ini," kata Dedie, Kamis (17/12).

Memang, kata dia, ada beberapa evaluasi dari bansos yang akan berakhir di tahun 2020 ini. Salah satunya soal keterlambatan. Karena, penyaluran bantuan dari Pemkot melewati Kantor Pos.

Pasalnya, Kantor Pos tak hanya melayani bansos dari Pem-

kot Bogor saja. Melainkan juga dari pemerintah provinsi dan pusat.

"Karena kapasitas kerja mereka terbatas, maka sifatnya adalah bertahap. Jadi setelah bansos pusat, bansos provinsi kemudian baru bansos dari kita (Pemkot)," terang Dedie lagi.

Meski begitu, Pemkot tak berniat untuk mencari pihak kedua untuk mengganti Kantor Pos. Terbukti dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah efektif. Tidak ada pembelian fiktif maupun tender yang nantinya bisa menimbulkan permasalahan.

"Jadi kita serahkan uang tunai saja ke masyarakat, nanti biar masyarakat belanja langsung. Yang penting by name by address-nya benar," ujarnya.

Soal kuota penerima bansos sendiri, Dedie mengaku belum mendapatkan update lagi berapa angka penerima bansos. Hanya saja, hingga saat ini data penerima masih menyesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kalau data non-DTKS-nya yang baru dikurangi, kita harus nambah. Tapi kita lihat nanti," pungkasnya. ● **gio**

Bupati Bogor Minta PilkaDes Wajib Terapkan Prokes

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin menekankan dalam Pemilihan Kepala Desa (Kades) untuk 88 desa yang ikut PilkaDes wajib menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam rangka mencegah Covid-19.

Hal ini ditegaskan Ade Yasin saat memimpin Rapat Evaluasi Persiapan Penyelenggaraan PilkaDes serentak dengan Forkopimda Kabupaten Bogor, Ruang Serbaguna 1 Setda, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12).

Ade Yasin menilai pada pelaksanaan PilkaDes di 88 Desa pada 34 Kecamatan yang digelar 20 Desember mendatang, harus memenuhi protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti melakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan pemungutan suara menyediakan peralatan kesehatan, jarak tempat duduk hak pilih di ruang tunggu TPS 1-2 meter dan diberi tanda.

"Saya juga minta hari Jumat petugas TPS harus di-rapid test sebelum PilkaDes dilaksanakan dan saat pelaksanaan harus terus melaksanakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk para camat standby di Kecamatan dan terus mengawal protokol kesehatan termasuk alat protokol kesehatan sudah harus siap," tegasnya.

Ia juga berharap pelaksanaan PilkaDes di Kabupaten Bogor berjalan lancar dan saat pelaksanaan PilkaDes pada tanggal 20 Desember mendatang tidak ada

kerumunan massa yang dapat menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu Kepala DPMD, Renaldi Yushab mengatakan bahwa pelaksanaan tahapan PilkaDes sudah sesuai timeline yang disusun. Ada beberapa perubahan terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ Tanggal 10 Desember 2020 Tentang Jumlah Pemilih di TPS PILKADES Serentak di Era Pandemi Covid-19.

Yakni satu TPS dibatasi maksimal 500 pemilih, sehingga jumlah TPS bertambah dari 703 menjadi 1.614, dengan jumlah hak pilih sesuai DPT sebanyak 753.798 hak pilih.

Sebagaimana hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa semua pihak harus mampu mengatasi dan menjaga untuk memastikan jangan sampai terjadi kerumunan baik sampai terjadi kerumunan dan saat kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara, penerapan SOP.

Hal ini dapat dilihat pada saat PilkaDes Serentak di berbagai daerah, bisa menjadi contoh dan bahan antisipasi untuk PilkaDes nanti.

Keberhasilan pelaksanaan PilkaDes saat pandemi ditentukan oleh 3 hal, yaitu ketersediaan APD untuk penyelenggara dan pemilih, pengaturan waktu kedatangan pemilih serta konsistensi aparat menegakkan aturan.

● **gio**



REVITALISASI MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT JAWA BARAT

Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/12). Revitalisasi Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tersebut ditujukan untuk menunjukkan identitas Jawa Barat melalui monumen dan tugu pandang serta mempercantik salah satu sudut ikon Kota Bandung.

Tak Ada CFN Saat Jalur Puncak Ditutup Malam Tahun Baru

CIBINONG (IM) - Polres Bogor memastikan bahwa tidak ada kegiatan Car Free Night (CFN) di Kawasan Puncak Bogor meski jalurnya akan ditutup di kedua arah selama 12 jam pada malam tahun baru 2021.

"Jadi kalau dulu kebiasaan setiap tahun ditutup dalam rangka car free night ya, ini enggak ada. Tutup tuh dalam artian bukan untuk car free night, tetapi untuk mengantisipasi adanya kerumunan," kata Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy di Cibinong, Bogor, Kamis (17/12).

Menurutnya, tidak diperkenalkannya ada kegiatan CFN di Kawasan Puncak Bogor karena Polres Bogor tidak lagi mengeluarkan izin keramaian sejak pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

"Kita enggak keluarkan izin (keramaian) dari semenjak ada Covid-19 kita tidak mengeluarkan izin. Aturan segala macam kita sesuaikan dengan Gugus Tugas," kata mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Roland mengaku akan

mengerahkan sekitar 700 personel kepolisian untuk mengamankan malam tahun baru dengan skala prioritas di Jalur Puncak.

Seperti diketahui, Kasatlantas Polres Bogor, Iptu Dicky Pranata mengungkapkan bahwa petugas kepolisian akan melakukan penutupan selama 12 jam Jalur Puncak tepatnya di pintu keluar-masuk Tol Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor pada malam tahun baru 2021.

"Demikian mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan mencegah penyebaran Covid-19 di sekitaran Jalur Puncak pada malam tahun baru 2021," ungkap Dicky.

Menurutnya, penutupan jalur akan dilakukan selama 12 jam mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2020 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2021.

Dicky menyebutkan, bagi pengendara yang ingin bepergian ke daerah Cianjur ataupun Bandung bisa menggunakan jalan alternatif selama Jalur Puncak ditutup. Ada dua jalan alternatif, yaitu lewat Sukabumi dan lewat Jonggol. ● **gio**

8 | Nusantara



MOU KERJASAMA JABAR - NTB CONNECTION

Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) menunjukkan surat nota kesepahaman (MoU) kerjasama Jabar - NTB Connection usai penandatanganan, di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Kamis (17/12). MoU kerjasama Pemprov NTB dan Pemprov Jawa Barat tersebut meliputi bidang pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pendidikan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta industri kreatif.

Ade Yasin Minta MUI Bogor Turun Tangan Hadapi Massa FPI

Bupati Bogor, Ade Yasin meminta MUI melakukan langkah persuasif kepada massa yang protes atas penahanan Pimpinan FPI Rizieq Shihab oleh Mabes Polri, agar tidak melanggar protokol kesehatan standar pencegahan Covid-19 jika tetap kekeh melakukan aksi demo di kantor polisi.

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turun tangan dalam menanganai massa Front Pembela Islam

(FPI) yang melakukan aksi demo di sejumlah kantor polisi wilayah Bogor.

"Saya minta camat agar berkoordinasi dengan MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama juga," kata bupati di Cibi-

nong, Bogor, Kamis (17/12).

Ia meminta MUI melakukan langkah persuasif kepada massa yang protes atas penahanan Pimpinan FPI Rizieq Shihab oleh Mabes Polri, agar tidak melanggar protokol kesehatan standar pencegahan Covid-19 jika tetap kekeh melakukan aksi demo di kantor polisi.

"Kalaupun ada aspirasi yang harus disampaikan, jangan sampai berbondong-bondong, 10 orang bisalah.

Karena yang penting kan tersampaikan pesannya," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.

Menanggapi hal itu, Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji mengajak

kepada umat islam di Kabupaten Bogor agar tetap menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Karena ini aspek hukum, ya kita serahkan saja kepada hukum yang berlaku, khususnya lembaga penegak hukum. Tentu kita semua yakin, aparat bisa bekerja seadil-adilnya dan sebijaknyabijaknya," kata KH Mukri.

Menurutnya, rentetan dinamika keagamaan yang belakangan terjadi merupakan ujian besar bagi umat islam. Ia berharap situasi tersebut bisa segera berlalu.

"Ini ujian dari Allah, yang namanya ujian itu jelas kita mesti lolos dan lulus agar kita punya nilai di ujian keimanan

dan keikhlasan ini," tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Bogor, Polda Jawa Barat, AKBP Roland Ronaldy menyarankan agar massa FPI yang melakukan aksi di kantor polisi untuk menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan praperadilan.

"Kita kan negara hukum ya, ada aturan hukum, ada jalur hukum, kalau tidak puas terhadap proses hukum, silakan praperadilan.

Gitu aja kan sudah ada ranahnya semua, semua sudah tahu lah," ungkap Roland.

Meski begitu, ia menganggap aksi demo massa FPI yang dilakukan di beberapa kantor Polsek di wilayah Kabupaten Bogor masih terpantau kondusif. ● **gio**

PWI Kab. Bogor Diharapkan Berkontribusi bagi Pembangunan

BOGOR (IM) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor,

Irwana Purnawan, mewakili Bupati Bogor berharap Rapat Kerja (Raker) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, di Hotel Mega Mendung Permai, Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12).

"Kami juga berharap semoga semua media/wartawan yang ada di kabupaten Bogor bisa menjalankan tupoksinya secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Dan juga kami mengimbau kepada semua SKPD agar bisa menghargai profesi jurnalis

(wartawan-red) yang mana merupakan profesi mulia sebagai pilar ke 4 demokrasi," ujar Kadiskominfo.

Melalui rapat kerja (Raker) PWI Kabupaten Bogor tahun 2020 menghasilkan pembentukan dan penunjukan kepantiaan persiapan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2021 hingga pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Dalam rapat kerja itu, Untung Bachtiar yang merupakan tim redaksi dari Radar Bogor, grup Jawa Pos ditunjuk sebagai ketua panitia HPN tahun 2021, adapun Alpin dipilih men-

jadi ketua panitia perhelatan UKW yang akan dihelat oleh PWI Kabupaten Bogor pada pertengahan tahun 2021.

Selain itu, Sekjen PWI Kabupaten Bogor, M. Nurofik tak luput ditunjuk juga untuk menentukan dan mewujudkan rencana pembangunan gedung PWI Kabupaten Bogor/Graha wartawan di tahun 2021, serta Ade Suryadi yang akrab disapa Omen ditunjuk pula untuk mengawal dan memprogres program pengkavling tanah yang diperuntukkan bagi seluruh anggota PWI.

Ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo berharap

banyak agar semua pihak yang telah diberi amanat oleh pengurusan PWI dan dewan penasihat PWI Kabupaten Bogor dapat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya.

"Semoga seluruh program kerja yang telah ditetapkan melalui raker PWI saat ini dapat terwujud sebagai mana mestinya sesuai dengan harapan kita semua," tegasnya.

PWI Kabupaten Bogor menggelar rapat kerja (Raker) tahun 2020 dengan mengusung tema 'Dengan Kekompakan Menjadikan PWI Kabupaten Bogor maju dan profesional'. ● **gio**

Publikasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2020



Kegiatan Bimbingan Sosial Pemulihan Kewirausahaan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) Se-Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.

Tujuan dari kegiatan Bimbingan Sosial Pemulihan Kewirausahaan Dampak Pandemi Covid 19 bagi penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) se-Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020, adalah untuk meningkatkan pembinaan dan meningkatkan mental serta keterampilan berwirausaha para Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) di tengah pandemi covid 19, dengan sasaran kegiatan: 30 dari Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuna) dan 20 dari Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), 25-27 November 2020, di hotel AccramCipayung-Megamendung Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan Kegiatan: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, DR. Mustakim SPd MM, yang memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara.

Narasumber terdiri dari: Drs. Erniyanti Msi dari Kementerian Sosial RI, Dra. Heryanti Wahyuningsih MM dari Dinas Sosial Prov Jawa Barat, Dra.Lisdiana Msi dari BRSPDI Ciungwanara sebagai Instruktur dan DR. Luki Maulana dari Universitas Juanda yang juga bertindak sebagai Instruktur.



Tujuan dari bimbingan pemulihan ekonomi bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tuna Sosial di masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020 ini adalah: Mencegah dan mengurangi tumbuh kembang serta meluasnya masalah kesejahteraan sosial, dan ketertiban umum, Mengentaskan penyandang masalah sosial (PMKS) agar dapat hidup layak guna memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial, Mewujudkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat/potensi sumber kesejahteraan sosial di wilayah penanganan sosial di wilayah penjangkauan.

Tempat Dan Waktu Pelaksanaan: Di Hotel Hotel New Ayuda Jl. Raya Puncak Km. 17 Cipayung, Kab. Bogor dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari Senin sampai Kamis tanggal 16, 17, 18 dan 19 November 2020 diikuti 40 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sedangkan Pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Bapak DR. Mustakim SPd MM yang memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara.

Narasumber dan Instruktur: M. Taufik Hidayatullah dari Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Lina Marlina SST, MPS.Sp dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dr. Lucky H. Maulana SE Msi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda, Dra. Ruwita Saleh MPS.Sp dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan peserta 40 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penganganan Bencana Sosial Covid-19: Kegiatan ini dimaksudkan memfasilitasi kegiatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana baik alam maupun bencana sosial, kegiatan fasilitasi Kampung Siaga Bencana (KSB), Bimbingan, Pemantapan SDM Penanggulangan Bencana, LDP dan Pelopor Perdamiaan Se-Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.

Tujuannya, Meningkatkan keterampilan bagi Anggota TAGANA, KSB, Pelopor Perdamiaan dan Tim LDP, Mempersiapkan dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan pasca bencana, Meningkatkan dan menyipakan tenaga-tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana alam dan sosial.



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, DR Mustakim SPd MM sekaligus membuka acara. Peserta dari anggota TAGANA dan Sahabat TAGANA sebanyak 30 orang dengan narasumber Tota Oceanna Zonneveld, Kepala Seksi Mitigasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Drs. Achwan Gumilar MM, Kepala Seksi PSKB Dinas Sosial Jawa Barat.

Kegiatan Bimtek Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi Karang Taruna Se-Kabupaten Bogor Tahun 2020: Seiring dengan makin dewasa organisasi Karang Taruna, bentuk-bentuk kegiatan maupun pendekatan yang dilaksanakan dalam proses penanganan berbagai masalah sosial yang menjadi perhatian Karang Taruna pun semakin kreatif. Mulai dari penanganan secara sederhana hingga penanganan yang terencana dan terorganisir dengan baik.

Karang Taruna sebagai tenaga penggerak pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktifnya, diperlukan upaya pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, sinergi dan kolaborasi antar-Karang Taruna di wilayah Kab.

Acara dilaksanakan di Hotel Grand Pesona Caringin Kabupaten Bogor tanggal 3-5 Desember 2020, diawali sambutan

Bogor.

Peran aktif Karang Taruna dalam kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial sudah cukup dirasakan, terutama dalam penanganan pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PpKS).

Oleh karena itu, Karang Taruna diharapkan dapat menggalang segala aspek yang menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial di masing-masing wilayah sesuai karakteristik yang ada.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Accram Cipayung Puncak Kabupaten Bogor 2-4 Desember 2020.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, DR. Mustakim SPd MM, sekaligus membuka acara. Peserta perwakilan Karang Taruna dari 40 Kecamatan sebanyak 40 orang.

Narasumber terdiri dari Dra. Heryanti Wahyuningsih MM dan Dra. Eti Ratiani Msi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Muhammad Satria SSo dari Institut Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Zainal Saprudin dari Tim Pancakarsa Bupati Bogor, Egi Gunadi Wibawa dari MPKT Kabupaten Bogor, Irfan Darajat, SE Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor dan Ruslan SH MM Karang Taruna Kab Bogor bidang Pertanian dan Peternakan. ● **jai/gio**

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Pesona Caringin Kabupaten Bogor tanggal 3-5 Desember 2020, diawali sambutan

